



tajam dalam masarakat Arab tersebut. Sedangkan dalam masarakat Islam pribumi dikarenakan sejak awal perkembangannya asas persamaan telah menjadi landasan integrasi bagi mereka, tidaklah ditemukan data tentang pertikaian tentang hal tersebut.

## B. Depolitisasi Islam.

Dengan daya pikat *tanpa kasta* (asas persamaan) pemeluk Islam semakin bertambah banyak, banyak kelas pedagang masuk Islam. Semakin banyak dan besarnya komunitas Islam terbentuklah integrasi antara agama, ekonomi dan politik dengan wujud berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Di Jawa mislanya, Kerajaan Demak merupakan simbol keintegrasian tersebut. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam ini, Islam di Indonesia tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik.

Keintegrasian tersebut tak dapat bertahan lama, ketika Belanda berkuasa di Indonesia, terutama di Jawa terjadilah pemisahan antara agama dan politik. Ummat Islam yang semula menjadi pemegang pemerintahan dan sekaligus menjadi rakyat, pada masa pendudukan Belanda ummat Islam berada di posisi rakyat, mereka menyebar ke pelosok-pelosok pedesaan. Sementara itu urusan pemerintahan dipegang oleh Belanda dan pembantu-pembantunya (yang disebut dengan *kaum Priyayi*) yang mendapat pendidikan model Belanda/Barat, sedangkan di

sisi lain sistem pendidikan ummat Islam lebih memfokuskan kepada urusan agama an sich yang cenderung ke orientasi mistis-religius yang hampir-hampir bersifat menafikan dunia. Dalam bidang ekonomi Belanda telah melumpuhkan perdagangan internasional ummat Islam yang berbasis di pesisir pantai utara Jawa. Begitulah Belanda telah merobek integrasi antara agama, ekonomi dan politik ummat Islam di Indonesia.

Awal masa pembaharuan keagamaan Islam di Indonesia merupakan tanda dimulainya perpindahan pereode sejarah ummat Islam dari mistis-religius ke ideologi, dari orientasi sufistik ke orientasi hukum. Ketika dimulainya pereode ideologi ini ummat Islam mulai mengenal organisasi modern. Pada masa ini pengaruh dari Arab merembes begitu kuatnya. Pengaruh ini merombak tatanan nilai Islam yang telah melembaga dan bergulat dengan budaya dalam masarakat. Terjadilah perubahan-perubahan pandangan, sikap dan orientasi pikir.

Perubahan sosial ekonomi membuat ummat Islam mempertanyakan kedudukan dirinya. Mereka sebelumnya menyebut diri sebagai *kawula alit* kini berubah menjadi *wong cilik* dan kemudian mengidentifikasi diri menjadi *ummat Islam* atau *ummat*.

Identifikasi diri menjadi *ummat* ini lebih bisa dikatakan sebagai pengkurusan kuantitas dari apa yang

disebut pemeluk Islam di Indonesia dengan menonjolkan kualitas keberagamaan. Di mana setelah diadakan identifikasi ini ummat Islam harus kehilangan saudaranya yang tidak termasuk dalam kategori *ummat* ini (orang-orang Islam yang belum bisa taat dalam beragama, kaum *abangan*) untuk direnggut oleh Komunisme yang anti agama. Identifikasi juga mengarahkan diri ummat Islam untuk menjadi eksklusifisme, dimana golongan nasionalis yang walaupun juga penganut Islam tidak diakui sebagai *ummat*.

Perubahan sistem sosial ummat Islam ini merupakan dampak dari perubahan orientasi pikir ummat Islam dari orientasi mistis-religius ke orientasi hukum/ideologi. Tatanan sosial dalam orientasi mistis-religius lebih longgar. Seseorang mudah menerima orang lain, lebih toleran dan mudah menerima budaya-budaya yang masuk. Sedangkan orientasi hukum tatanan sistemnya sangat ketat. Terbukti setelah masuknya orientasi hukum ke Indonesia ummat Islam mengidentifikasi diri menjadi *ummat*. Sedangkan *ummat* yang menjadi eksklusif itupun masih diidentifikasi lagi dengan paham-paham keagamaan yaitu golongan pembaharu dan tradisional.

Dampak dari munculnya kaum priyayi yang berpendidikan Barat adalah pada masa pembentukan negara Indonesia setidaknya terdapat dua kekuatan yang saling berebut pengaruh dalam membentuk negara. Golon-

gan priyayi ingin mempertahankan pola pemerintahan Belanda dengan memisahkan antara urusan agama dan negara, sedangkan golongan santri/ummat Islam menginginkan agama menjadi *soko guru*/penegak pemerintahan. Dikarenakan golongan santri/ummat Islam masih terlalu muda untuk mengenal urusan pemerintahan/politik karena sistem pendidikannya yang berfokus pada agama an sich itu, sedangkan kaum priyayi telah banyak berpengalaman dalam urusan pemerintahan disamping sistem pendidikannya yang berfokus pada urusan dunia (termasuk di dalamnya urusan pemerintahan), maka golongan santri/ummat Islam tak mampu memenangkan dalam perebutan pengaruh tersebut.

Ditambah lagi sejak masa pembaharuan keagamaan Islam kaum santri telah terbelah kekuatannya menjadi dua (kaum pembaharu dan kaum Tradisionalis), dimana walaupun pada awal kemerdekaan mereka berusaha bersatu, kebersatuan itu tak dapat mereka pertahankan dikarenakan antar keduanya saling berebut pengaruh. Sebagai kelanjutan dari terbelahnya kekuatan kaum santri tersebut bisa dikatakan bahwa terdapat batas yang memisahkan antara kedua kekuatan tersebut.

Di dalam tubuh ummat Islam terdapat batas antar kedua golongan, sementara itu kondisi perpolitikan ummat bersifat oposan terhadap pemerintah, maka demi keselamatan kebersatuan ummat patutlah dihilangkannya

orientasi politik ummat. Dengan begitu tak ada lagi batas yang menghalangi kerjasama antar kedua golongan ummat Islam dan antar ummat Islam dengan pemerintah.

Sikap depolitisasi itu sangatlah tepat dipandang dari segi pemeliharaan integrasi ummat. Karena disamping demi kebersatuan antara dua golongan dalam Islam, di dalam pemerintahan juga terdapat orang-orang Islam yang bila terjadi batas antara ummat Islam dengan pemerintah, orang-orang Islam yang duduk dalam pemerintahan tersebut bisa semakin jauh dengan saudara-saudaranya. Dengan begitu memungkinkan banyak orang-orang Islam yang semula tidak termasuk dalam definisi santrinya Geertz akan terserap masuk ke dalamnya. Bila dilihat dari segi periodisasi sejarah ummat sikap depolitisasi Islam bisa disebut dengan *deideologisasi Islam*.

Sebagai dampak dari masuknya orientasi ideologi ummat Islam ingin mensosialisasikan norma-norma sistem melalui konstitusi negara. Dikarenakan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengkonstitusionalisasikan norma-norma sistem mendapat tantangan yang keras dari pihak luar, maka cukuplah ummat Islam mewarnai konstitusi negara dengan nilai-nilai Islam.

Dengan melihat tantangan-tantangan yang dihadapi perilaku politik ummat Islam terpolarisasi. Mereka saling berebut untuk lebih berjasa (*fas-tabiqlu khair-*



hilangnya orientasi hukum atau ideologi tersebut dengan sendirinya ummat Islam di Indonesia bersatu kembali. Tak dapat dipungkiri pada masa ideologi ummat Islam tidaklah terus menerus bertikai. Akan tetapi bila mengingat bahwa konflik yang terjadi adalah masalah nilai, selama nilai yang dipermasalahkan itu tetap dipegangi erat-erat oleh masing-masing golongan yang bertikai, maka masalah nilai menjadi *latent*. Kita menoleh kepada peristiwa menjelang keluarnya NU dari Masyumi pada tahun 1952, walaupun ummat Islam telah disatukan dengan membentuk MIAI kemudian menjelma menjadi Masyumi suatu saat masih terjadi konflik. Konflik yang secara psikologis sebagai kelanjutan dari konflik yang terjadi sebelum terbentuknya MIAI. Dalam bab sebelumnya telah kita bahas bahwa kaum pembaharu terutama dari kelompok faksi Natsir (dalam Parlemen) sering mengejek para penganut Islam tradisional. Tercatat juga dalam peristiwa sejarah pada tahun 1971 mengenai masalah PEMILU bagaimana Muhammadiyah dan NU bersimpang jalan tentang fatwa mengenai PEMILU. Dengan tanpa integrasi nilai tersebut kebersatuan ummat Islam yang dibentuk melalui MIAI dan Masyumi tak dapat dipertahankan.

Ummat Islam selama berpuluh-puluh tahun tercerai berai akibat masuknya orientasi ideologi, yang menurut Snouck Hurgronje ummat Islam dengan orientasi ini



Dengan begitu bisa dikatakan bahwa nilai-nilai keagamaan di Indonesia yang melembaga pada periode ini relatif sama. Yaitu bercorak mistis-religius dengan cirikhas amat toleran terhadap kebudayaan-kebudayaan lokal. Dalam bidang fiqh dikarenakan produk-produk fiqh syafi'iyah bersesuaian dengan kepribadian bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia bermadzhab Syafi'i.

Integrasi sosial memang tidak tampak, namun nilai-nilai yang mendasari umat Islam di seluruh Indonesia adalah sama, integrasi nilai. Integrasi nilai merupakan faktor penting dalam membentuk integrasi sosial.

Tak heran pada masa pembaharuan nilai-nilai keagamaan di Indonesia, terjadi dua front kekuatan yaitu kaum pembaharu yang menginginkan pembaharuan dan kaum Islam tradisi yang ingin mempertahankan lembaga-lembaga nilai keagamaan yang telah melembaga berabad-abad saat itu. Terjadinya dua front kekuatan itu keberadaannya dikoordinir oleh sesuatu kekuatan tertentu. Sebenarnya yang mengkoordinir adalah nilai-nilai itu sendiri.

Timbulnya dua golongan dalam umat Islam ditinjau dari segi pelembagaan nilai-nilai Islam, pelembagaan lebih bisa dikatakan sebagai penyebab timbulnya dua golongan tersebut. Di satu pihak dari golongan itu menginginkan tetap memegang nilai-nilai lama, di lain

pihak menginginkan perubahan.

Nilai-nilai lama telah melembaga dan tersistem dalam tatanan sosial keagamaan menurut konteks kedaerahan atau kebangsaan. Dimana nilai-nilai Islam berbaur dengan budaya bangsa sehingga kehilangan banyak warna aslinya. Dengan masuknya orientasi hukum atau ideologi ini pemasok nilai-nilai baru bersikap tegas dalam memasukkan nilai-nilai baru yang dianggap murni. Kaedah norma sosial keagamaan Islam di Indonesia menjadi goncang.

Dalam suasana kegoncangan ini para ulama yang merasa bertanggung jawab dalam memelihara sistem sosial keagamaan Islam di Indonesia membentuk kelompok-kelompok sosial keagamaan yang mempunyai fungsi memelihara sistem sosial keagamaan. Kelompok pemasok nilai-nilai baru bekerja dengan mengadakan perubahan-perubahan yang berada dalam sistem sosial dengan memasukkan nilai-nilai baru untuk mengganti nilai-nilai lama yang dianggapnya tidak sesuai dengan sistem norma Islam yang murni. Kelompok lain yang dikatakan sebagai kelompok tradisional bekerja untuk menjaga agar umat yang dilanda kegoncangan yang diakibatkan oleh goyahnya kaedah-kaedah norma sosial keagamaan itu tidak terpengaruh keluar dari sistem dengan membentuk sistem tersendiri. Kelompok tradisional bisa dijadikan tempat pelarian dari orang-orang Islam yang meno-

lak nilai-nilai baru. Kedua kelompok dalam sistem sosial keagamaan Islam di Indonesia ini dengan sangat terpaksa merelakan kelompok tertentu terpentak keluar dari sistem dikarenakan ide-idenya tidak tertampung oleh kedua kelompok tersebut. Kelompok yang terpentak itu adalah orang-orang Islam yang terpengaruh dan kemudian menciptakan kelompok keagamaan baru yaitu komunisme.

Keberadaan kedua kelompok sosial keagamaan tersebut sangatlah penting dalam memelihara kuantitas maupun kualitas sosial keagamaan di Indonesia. Kelompok pembaharu mengembangkan kualitas keagamaan dengan kemurniannya sedangkan kelompok tradisional memelihara kuantitas dengan cara menampung mereka-mereka yang tidak bisa menerima nilai-nilai baru.

Jika kelompok tradisional saat itu melebur diri ke kelompok pembaharu bisa dipastikan akan banyak orang-orang Islam yang terpentak keluar dari sistem sosial keagamaan Islam. Dan orang-orang yang termasuk dalam definisi *ummat* akan sangat kecil. Perlu diingat bahwa kedua kelompok sosial keagamaan itu merupakan kelompok *putihan* seperti yang dikatakan oleh Snouck Hurgronje, kelompok *putihan* ini merupakan kelompok minoritas dalam masyarakat Islam di Indonesia. Maka dengan meleburnya kelompok tradisional ke dalam kelompok pembaharu bagi mereka yang tidak tertampung

akan semakin banyak orang-orang Islam yang keluar dari sistem. Dan kaum *putihan* yang minoritas itu akan semakin minoritas.

Walaupun tampaknya kedua golongan itu bersimpang jalan dan kadang terlibat konflik, namun lebih bisa dipahami bahwa kedua kelompok tersebut berlomba/bersaing (*fas-tabiquil khairat*) dalam memelihara sistem keagamaan Islam di Indonesia. Kelompok pembaharu menegakkan sistem norma yang murni yang selayaknya harus dianut dan kelompok tradisional menjaga keutuhan warga dalam sistem sosial keagamaan itu.

Keberadaan konflik antar umat Islam selama ini telah berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan keseimbangan sistem sosial keagamaan Islam di Indonesia. Pada diri kalangan tradisional terdapat residu/endapan yang merupakan kecenderungan untuk mempertahankan dan melestarikan lembaga nilai-nilai yang dianggapnya telah mapan. Residu itu disebut oleh Pareto sebagai *The presistensi of agregates*.<sup>4</sup>

Residu ini sangat berfungsi sebagai rem terhadap perubahan-perubahan secara revolusioner yang dilancarkan oleh kaum pembaharu. Jika saat awal dilancarkannya pembaharuan tidak ada residu ini kondisi

---

<sup>4</sup>K.J. Veger, *Realitas Sosial*, Gramedia, Jakarta, 1984, hal.





Telah beberapa tahun kebersatuan ummat Islam diporak-porandakan oleh masuknya interpretasi baru terhadap pesan-pesan keagamaan dalam masarakat, sedangkan interpretasi lama telah melembaga berpuluh bahkan beratus tahun dalam masarakat. Misalnya dalam masalah fiqh, sistem bermadzhab telah melembaga begitu kokoh dan kuatnya didobrak dengan fiqh tanpa madzhab. Identitas keislaman yang ditawarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari mampu menempatkan urusan fiqh ini ke dalam urusan Islam yang bukan urusan dasar, artinya dalam masalah fiqh di atas tidaklah sampai menggagalkan keislaman seseorang dikarenakan fiqh merupakan interpretasi dari teks wahyu sebagai sumber ajaran itu, sedangkan interpretasi bukanlah sumber ajaran Islam. Maka dalam masalah khilafiyah yang menga-rahkan ummat membentuk persatuan adalah *relativisme interpretasi* keagamaan terhadap sumber atau dasar ajaran agama.

#### D. Prinsip Tegaknya Kehormatan Dan Kemulyaan Agama Islam.

Terjadinya konflik antar ummat Islam tidaklah terus menerus. Di saat-saat tertentu dikarenakan kehormatan dan kemulyaan sistem dinodai orang, mereka juga tak dapat membendung diri untuk tidak membentuk suatu kelompok (walaupun temporer) dengan prinsip tegaknya kehormatan dan kemulyaan agama Islam. Kesenrentakan kebersatuan itu berfungsi sebagai pemberi

penjelasan bahwa suasana konflik itu tidaklah menggoyahkan sistem sosial keagamaan Islam di Indonesia, justru malah memperkuat sistem. Mereka tetaplah masih disatukan oleh nilai-nilai dasar Islam yang tidak bisa ditawar-tawar, yang menjadi kesepakatan bersama untuk tetap ditegakkan dan tidak boleh berubah. Diantara mereka terbentuk kesadaran kolektif yang memperjuangkan tegaknya kehormatan dan kemulyaan agama.

Kesadaran kolektif mampu membawa umat Islam untuk bergerak secara spontan untuk membela kehormatan dan kemulyaan agama bila kehormatan dan kemulyaan tersebut terancam. Jadi kesadaran kolektif dalam hal ini terwujud secara emosional yang oleh Durkheim disebut *sentimen kemasyarakatan*. *Sentimen Kemasyarakatan* di dalam batin manusia berupa suatu kompleks perasaan yang mengandung rasa bakti, rasa terikat, rasa cinta dan sebagainya terhadap masyarakatnya sendiri yang merupakan seluruh alam dunia dimana ia hidup.<sup>7</sup>

Dunia keislaman telah melingkupi seluruh hidup umat Islam, Islam telah menjadi pandangan hidupnya atau nilai-nilai Islam telah melandasi sikap hidupnya. Diantara mereka terikat rasa bakti, rasa cinta, dan sebagainya terhadap masyarakat keislamannya yang telah

<sup>7</sup>Durkheim dalam Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat, Jakarta, 1985, hal.226.







Islam sebagai identitas diri ini berfungsi sebagai landasan kerukunan antar ummat Islam pada masa pendudukan Jepang. Dimana setelah menerima materi ajaran Shintoisme, ummat Islam semakin memahami akan kesyirikan ajaran di luar Islam. Dengan menoleh keluar, dengan menoleh kesyirikan ajaran lain, maka diantara sesama muslim akan terjadi integrasi.

Asas persamaan dalam item "A" di atas merupakan suatu penegasan diri ummat Islam, bahwa diantara mereka adalah sama, adapun yang berbeda adalah diantara yang Islam dan yang kafir. Depolitisasi Islam merupakan sebuah upaya untuk menganggap politik bukan sebagai ajaran dasar agama, melainkan sebagai budaya. Ajaran dasar menurut ummat Islam tidaklah boleh berubah, sedangkan budaya boleh berubah. Maka sikap depolitisasi Islam merupakan penafian terhadap politik yang dianggap sebagai budaya itu, apalagi bila politik ternyata membawa ummat ke dalam perceraian beraian. Relativisme interpretasi keagamaan hanya dianggap sebagai kekayaan intelektual, tidak mengandung kebenaran yang mutlak. Serupa dengan politik, interpretasi keagamaan tidaklah dianggap sebagai ajaran dasar. Dari relativisme ini interpretasi tidak lagi menjadi biang kerok perpecahan ummat Islam. Pada saat terjadi bagaimanapun tajamnya, bila kehormatan dan kemulyaan agama Islam terganggu ummat Islam tetap akan bisa bersatu

kembali. Harga diri sebagai ummat Islam melekat dalam diri mereka masing-masing.

Secara operasional asas persamaan, depolitisasi Islam, relativisme interpretasi keagamaan, prinsip tegaknya kehormatan serta kemulyaan Islam dan Islam sebagai identitas diri merupakan landasan gerak atau sikap ummat Islam di Indonesia yang membawa ummat Islam kepada kerukunan diantara mereka. Walaupun kadang terlibat konflik, diantara mereka masih terdapat landasan-landasan sikap yang kokoh dan kuat yang membawa kepada kerukunan. Landasan-landasan ini tertanam di dalam jiwa ummat Islam yang sikap dan perilakunya dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan Islam.

Dengan demikian Teologi kerukunan antar ummat Islam di Indonesia telah teroperasionalisasi di dalam perjalanan sejarahnya. Landasan-landasan sikap yang membawa ummat Islam kepada kerukunan itu disebut dengan *Teologi Kerukunan*. Dari penelitian yang tertuang dalam skripsi ini penulis hanyalah memberi istilah dari nilai-nilai Islam yang telah membawa ummat Islam kepada kerukunan dengan *Teologi Kerukunan*.